



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WEDHA MAGMA ARDHI
2. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3. NHK : 427853

II. DATA HARTA

- | | | |
|--|------------|--------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 501.500.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/55 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 254.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/55 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 247.500.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 132.400.000 |
| 1. MOTOR, HONDA KHARISMA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000 | | |
| 2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
7.800.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
7.100.000 | | |
| 4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
8.500.000 | | |
| 5. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 125.900.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 210.503.780 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |



Sub Total	Rp.	970.303.780
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	970.303.780

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.